



**TANGGUNGJAWAB KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor
334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)**

TESIS

**MOHAMAD SOFYAN ISKANDAR ALAM
1810622071**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**



**TANGGUNGJAWAB KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor
334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

**MOHAMAD SOFYAN ISKANDAR ALAM
1810622071**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINASLITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mohamad Sofyan Iskandar Alam

NIM : 1810622071

Tanggal : 19 Juli 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Mohamad Sofyan Iskandar Alam

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Sofyan Iskandar Alam

NIM : 1810622071

Program Studi : Hukum

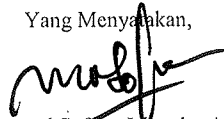
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Tanggungjawab Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)”. Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Mohamad Sofyan Iskandar Alam

PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Mohamad Sofyan Iskandar Alam

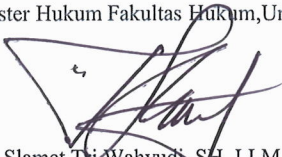
NPM : 1810622071

Program Studi : Magister Hukum

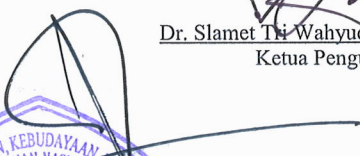
Judul Tesis :

“ Tanggungjawab Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor : 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT) ”


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



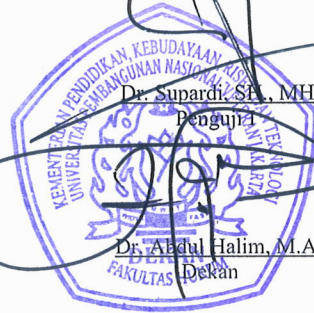
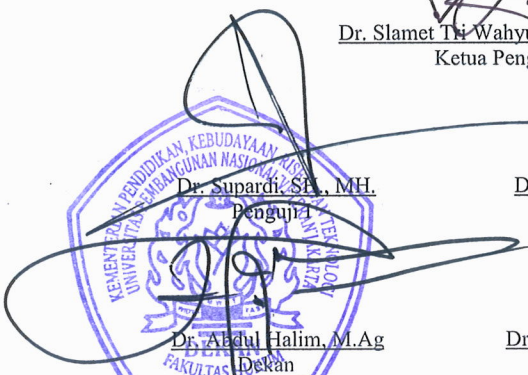
Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, LLM.
Ketua Penguji



Dr. Supardi, SH., MH.
Penguji I



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Juli 2021

ABSTRAK

Sanksi pidana bagi korporasi umumnya tidak berupa sanksi tunggal. Selain denda, penyitaan, serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif. Sanksi larangan dalam berbagai bentuknya itu dapat disebut sebagai *corporate imprisonment*. Di samping itu, sanksi tambahan berupa pengumuman keputusan hakim dapat menambah daya memaksa untuk mencegah dilakukannya tindak pidana oleh korporasi, namun dalam prakteknya, seringkali perkara perpajakan tidak melibatkan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus atau agen sudah dianggap cukup, salah satu contoh dalam perkara perpajakan Nomor : 292/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT dan perkara perpajakan Nomor : 62/PID.SUS/2019/PN.YYK, dimana dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus atau agen sedangkan korporasi tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan bertentangan dengan teori agregasi (*Aggregation Theory*) dimana aktivitas suatu korporasi yang merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa pengurus atau agen sehingga yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut adalah tanggungjawab korporasi dan juga terhadap Teori Identifikasi (*Direct Corporate Criminal liability*), menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi. Sesuai dengan tujuan pemidanaan dan teori efek jera, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi bersama dengan pengurus atau agen agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya (*deterrence effect*) dan terhadap korporasi yang diminta pertanggungjawaban pidana selain menerapkan pidana denda, terhadap korporasi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan dan diharapkan aparat penegak hukum yang menangani perkara perpajakan membuat suatu terobosan hukum untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak serta membuat memperbaiki UU KUP untuk mengatur secara tegas terhadap subjek hukum dengan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi.

Kata kunci: tanggungjawab korporasi dalam perkara tindak pidana perpajakan

ABSTRACT

Criminal sanctions for corporations are generally not in the form of a single sanction. In addition to fines, confiscation, as well as various prohibitions for corporations are sanctions that are considered effective. Sanctions of prohibition in its various forms can be referred to as corporate imprisonment. In addition, additional sanctions in the form of announcements of judges' decisions can increase the coercive power to prevent criminal acts from being committed by corporations, but in practice, tax cases often do not involve corporations as legal subjects and criminal liability only to management or agents is considered sufficient. in the tax case Number: 292/PID.SUS/2019/PN.JKT.BRT and the tax case Number: 62/PID.SUS/2019/PN.YYK, where in that case, criminal responsibility is charged to the management or agent while the corporation is not be asked for criminal responsibility, and contrary to the Aggregation Theory where the activities of a corporation which is the output of the joint efforts of some administrators or agencies so that those who are fully responsible for these activities are the responsibility of the corporation and also to the Identification Theory (direct corporate criminal liability). According to this theory, corporation can commit a number of delicts directly through agencies who are closely related to the corporation, acting for and on behalf of the corporation. In accordance with the purpose of punishment and the deterrent effect theory, corporations can be held criminally responsible for tax crimes committed by corporations together with management or agents so that criminals will no longer repeat their crimes (deterrence effect) and against corporations who are asked to be held criminally responsible in addition to applying fines, against the corporation may be subject to additional penalties in the form of revocation of business licenses and dissolution of the company and it is hoped that law enforcement officers who handle tax cases will make a legal breakthrough to optimize criminal liability for corporations and their management in order to increase state revenue from the tax sector and make updates to the KUP Law to regulate firmly against legal subjects by imposing criminal responsibility on management and corporations.

Keywords: *Corporate responsibility in tax crime cases*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT untuk Rahmat dan Karunia Nya dan Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ Tanggungjawab Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT) ”.

Penyusunan tesis merupakan bagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini secara tulus penulis menyampaikan terimakasih kepada Ibu Nurita Soamole, orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat, rekan-rekan Tim Hijau dan seluruh keluarga besar Alm.Harmain Iskandar Alam, serta rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA sebagai Rektor UPN Jakarta**
2. **Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Hukum UPN Jakarta.**
3. **Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Jakarta**
4. **Bpk, Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH. MH.** selaku Ketua Tim Penguji Tesis kami
5. **Bpk, Dr. Supardi, SH. MH.** selaku Tim Penguji Tesis kami
6. **Bpk, Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH.** sebagai Pembimbing sekaligus penguji.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program Magister Hukum **UPN Jakarta**, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
8. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum kelas kampus UPN Jakarta angkatan 2018 yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Jakarta, 19 Juli 2022

Penulis

Mohamad Sofyan Iskandar Alam
NIM 1810622071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Ruang Lingkup Penelitian	9
I.3. Rumusan Masalah	9
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
I.5. Literature Review	10
I.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
I.7. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
II.1. Definsi Pajak Dan Hukum Pajak Di Indonesia	25
1. Definsi Pajak.....	25
2. Hukum Pajak di Indonesia.....	27
II.2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum	30
II.3. Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
III.1. Jenis Penelitian.....	41
III.2. Pendekatan Penelitian Hukum	43
III.3. Teknik Pengumpulan Data.....	44
III.4. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
IV.1. Kerangka Pemikiran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	49
IV.2. Sanksi Pidana Terhadap Subjek Hukum Perpajakan	56
IV.3. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perpajakan Nomor : 334/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Brt, Nomor : 92/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Brt Dan Nomor : 62/Pid.Sus/2019/Pn.Yyk	58
BAB V PENUTUP	74
V.1 Kesimpulan	74
V.2. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP.....	79